

RELASI KUASA DAN SEKSUALITAS DALAM PACARAN: ANALISIS CONSENT PEREMPUAN PADA HUBUNGAN TIDAK SEHAT

Fatimah Aulia Rahma

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia; fatimahauliarahma82@gmail.com

* Corresponding Author : fatimahauliarahma82@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 15 Mei 2026 Direvisi: 25 Mei 2026 Disetujui: 27 Juni 2026 Tersedia Daring: 21 Juli 2026 Kata Kunci: Relasi Kuasa; Consent; Seksualitas; Gender; Hubungan Intim	Penelitian ini mengkaji dinamika relasi kuasa dan seksualitas dalam hubungan pacaran dengan fokus pada pembentukan <i>consent</i> perempuan dalam hubungan intim yang tidak sehat di kalangan mahasiswa. Penelitian berangkat dari pertanyaan mengenai sejauh mana <i>consent</i> merupakan keputusan yang otonom atau dipengaruhi oleh relasi kuasa yang bekerja secara halus dalam hubungan pacaran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap delapan mahasiswa perempuan berusia 20–23 tahun di Kota Surabaya yang pernah mengalami hubungan pacaran tidak sehat. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dan diinterpretasikan melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault, khususnya konsep kekuasaan, <i>governmentality</i>, dan kontrol sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>consent</i> sering kali terbentuk melalui praktik dominasi yang bersifat subtil, seperti manipulasi emosional, pengawasan digital, perilaku posesif, pembatasan relasi sosial, rasa takut kehilangan pasangan, serta ketergantungan emosional yang tidak setara. Selain itu, <i>consent</i> kerap diasumsikan hadir berdasarkan kedekatan emosional dan status hubungan tanpa komunikasi yang eksplisit. Budaya digital dan romantisasi perilaku posesif turut memperkuat normalisasi relasi yang tidak sehat. Temuan ini menegaskan bahwa <i>consent</i> merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, norma gender, ketergantungan emosional, dan budaya digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi mengenai <i>consent</i>, batasan personal, dan relasi yang sehat sebagai upaya mencegah normalisasi hubungan intim yang tidak sehat di kalangan mahasiswa.
	ABSTRACT
Keywords: Power Relations, Consent, Sexuality, Gender, Intimate Relationships	<i>This study examines the dynamics of power relations and sexuality in dating relationships by focusing on the formation of women's consent in unhealthy intimate relationships among university students. It addresses the extent to which consent represents an autonomous decision or is shaped by subtle forms of power operating within intimate relationships. A qualitative study with a phenomenological approach was employed. Data were collected through semi-structured, in-depth interviews with eight female university students aged 20–23 years in Surabaya, Indonesia, who had experienced unhealthy dating relationships. The data were analyzed using thematic analysis and interpreted through Michel Foucault's concepts of power, governmentality, and social control. The findings reveal that consent is often constructed through subtle forms of domination, including emotional manipulation, digital surveillance, possessive behavior, restrictions on social relationships, fear of losing a partner, and unequal emotional dependency. Consent is also frequently assumed to exist based on emotional intimacy and relationship status without explicit communication between partners. Furthermore, digital culture and the romanticization of possessive behavior contribute to the normalization of unhealthy relationships among young adults. These</i>

findings suggest that consent should be understood as a socially constructed process shaped by power relations, gender norms, emotional dependency, and contemporary digital culture. Strengthening critical literacy on consent, personal boundaries, and healthy relationships is therefore essential to prevent the normalization of unhealthy intimate relationships among university students.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Perubahan pola hubungan pacaran di kalangan mahasiswa menunjukkan transformasi dalam cara individu memahami kedekatan emosional, hubungan intim, dan seksualitas. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, perubahan norma gender, serta semakin terbukanya diskursus mengenai seksualitas di ruang publik (Jackson and Scott 2022). Hubungan pacaran tidak lagi dipahami semata sebagai relasi personal, melainkan sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya negosiasi identitas, emosi, dan seksualitas (Beres and A 2023). Dalam perspektif sosiologis, seksualitas merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui relasi sosial, budaya, dan mekanisme kekuasaan yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari (Foucault 1991).

Kajian mengenai seksualitas menunjukkan bahwa relasi intim tidak pernah terlepas dari praktik kekuasaan. Menurut Foucault (1978), kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui dominasi yang bersifat langsung, tetapi juga melalui pembentukan norma, pengaturan tubuh, dan proses pendisiplinan yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dalam hubungan pacaran, mekanisme tersebut dapat muncul dalam bentuk ketimpangan posisi, ekspektasi gender, maupun berbagai bentuk kontrol interpersonal yang memengaruhi cara individu mengambil keputusan dalam hubungan intim (Connell 2022).

Salah satu konsep penting dalam kajian hubungan intim adalah *consent*, yaitu persetujuan yang diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dalam aktivitas seksual (Jozkowski, Willis, and Murray 2022). Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa praktik *consent* dalam hubungan romantis sering kali tidak dibangun melalui komunikasi yang eksplisit, melainkan diasumsikan berdasarkan kedekatan emosional dan status hubungan (Beres and A 2023). Situasi ini menyebabkan batas antara persetujuan yang bebas dan tekanan relasional menjadi semakin kabur, terutama ketika norma gender masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan seksual.

Kondisi tersebut semakin kompleks karena berbagai bentuk kekerasan dalam pacaran tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih didominasi oleh kekerasan di ranah personal. Dari 4.371 pengaduan

langsung yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, sebanyak 2.098 kasus (48%) terjadi di ranah personal, yang mencakup hubungan suami-istri, pacaran, mantan pasangan, dan relasi keluarga. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan meliputi kekerasan psikologis, kontrol emosional, kekerasan seksual, serta berbagai bentuk relasi yang bersifat manipulatif. Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik banyak dialami oleh anak muda dan dalam banyak kasus dilakukan oleh pacar atau mantan pacar, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh budaya digital terhadap dinamika kekerasan dalam hubungan intim. Temuan tersebut relevan dengan kelompok mahasiswa karena fase dewasa awal merupakan periode ketika individu mulai membangun hubungan romantis yang lebih intens, sementara penggunaan media digital yang tinggi dapat memperkuat praktik pengawasan, kontrol, dan manipulasi emosional dalam relasi pacaran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pembentukan *consent* dalam hubungan pacaran mahasiswa menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam konteks hubungan intim kontemporer (Komnas Perempuan 2023). Di sisi lain, perkembangan media sosial dan budaya digital turut membentuk cara mahasiswa memaknai hubungan romantis melalui normalisasi perilaku posesif, pengawasan digital, serta romantisasi pengorbanan dalam hubungan (Jackson and Scott 2022).

Meskipun kajian mengenai *consent* terus berkembang, sebagian besar penelitian masih menempatkannya dalam perspektif hukum dan psikologi yang berfokus pada aspek legalitas, komunikasi seksual, atau kondisi psikologis individu. Pendekatan sosiologis yang menempatkan *consent* sebagai hasil interaksi antara relasi kuasa, norma gender, dan konteks sosial masih relatif terbatas (Jozkowski, N, and Willis 2021; Palermo and Claire 2022). Beberapa penelitian mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga menunjukkan bahwa relasi kuasa berperan dalam membentuk pengalaman korban, tetapi belum secara khusus menjelaskan bagaimana praktik *consent* terbentuk dalam hubungan pacaran mahasiswa (Wartoyo 2023).

Berbagai penelitian mengenai *consent* menunjukkan bahwa kajian yang ada masih didominasi oleh perspektif hukum dan psikologi. Pendekatan hukum umumnya menempatkan *consent* sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kekerasan seksual serta menekankan aspek legal, pembuktian, dan perlindungan hak korban. Sementara itu, pendekatan psikologi lebih banyak mengkaji *consent* sebagai proses komunikasi interpersonal, pengambilan keputusan seksual, persepsi terhadap isyarat persetujuan, serta faktor-faktor individual yang memengaruhi perilaku seksual (Jozkowski, Willis, and Murray 2022; Neal et al. 2022). Meskipun memberikan kontribusi penting, kedua pendekatan tersebut masih relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana *consent* dibentuk melalui relasi kuasa yang bekerja secara subtil dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui norma gender, ketergantungan emosional, pengawasan digital, dan romantisasi hubungan. Padahal, berbagai kajian sosiologis menunjukkan bahwa keputusan individu dalam hubungan intim tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, praktik diskursif, dan mekanisme kekuasaan yang membentuk cara seseorang memahami kebebasan, pilihan, dan relasi dengan pasangan (Foucault 1978; Connell 2022; Beres and A 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif relasi kuasa Michel

Foucault untuk menjelaskan bagaimana perempuan memaknai *consent* dalam hubungan pacaran tidak sehat sebagai praktik sosial yang dikonstruksi melalui interaksi antara kekuasaan, norma gender, pengalaman emosional, dan budaya digital.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretatif (*Interpretative Phenomenological Analysis/IPA*) untuk memahami pengalaman hidup perempuan dalam memaknai *consent* pada hubungan pacaran yang tidak sehat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana individu memberi makna terhadap pengalaman personalnya serta bagaimana makna tersebut dibentuk melalui konteks sosial dan relasi kekuasaan (Smith, Flowers, & Larkin, 2022; Creswell & Poth, 2018). Perspektif ini sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan pengalaman informan, tetapi juga menginterpretasikan pengalaman tersebut melalui konsep relasi kuasa Michel Foucault.

Penelitian dilakukan di Kota Surabaya dengan melibatkan delapan mahasiswa perempuan berusia 20–23 tahun yang pernah mengalami hubungan pacaran tidak sehat, khususnya dalam situasi negosiasi *consent* pada hubungan intim. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kesesuaian pengalaman dengan tujuan penelitian (Campbell et al., 2020). Kriteria informan meliputi mahasiswa aktif, berusia 20–23 tahun, memiliki pengalaman berpacaran, dan pernah menghadapi situasi negosiasi *consent*. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan tema atau informasi baru (Hennink & Kaiser, 2022).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilaksanakan secara tatap muka maupun daring sesuai preferensi informan. Wawancara berfokus pada pengalaman hubungan pacaran, proses terbentuknya *consent*, dinamika relasi kuasa, pengalaman emosional, serta pengaruh norma gender dan budaya digital terhadap pengambilan keputusan dalam hubungan intim (Kvale & Brinkmann, 2015). Seluruh wawancara direkam atas persetujuan informan, ditranskripsikan secara *verbatim*, dan dilengkapi dengan catatan lapangan (*field notes*) untuk mendokumentasikan konteks wawancara serta refleksi peneliti selama proses pengumpulan data.

Analisis data mengikuti enam tahapan *reflexive thematic analysis* Braun dan Clarke (2006), yaitu: (1) memahami data melalui pembacaan transkrip secara berulang, (2) menghasilkan kode awal, (3) mengembangkan tema-tema awal, (4) meninjau dan memurnikan tema berdasarkan keseluruhan data, (5) mendefinisikan serta memberi nama setiap tema, dan (6) menyusun interpretasi temuan. Setelah tema terbentuk secara induktif dari pengalaman partisipan, peneliti melakukan interpretasi pada tingkat konseptual menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault untuk menjelaskan bagaimana praktik *consent* dibentuk oleh mekanisme normalisasi, *governmentality*, dan relasi kuasa dalam hubungan intim.

Untuk menjamin *trustworthiness*, penelitian menerapkan *member checking* dengan meminta informan meninjau kembali ringkasan hasil wawancara agar sesuai dengan pengalaman mereka, *peer debriefing* dengan sesama peneliti untuk mendiskusikan proses

pengodean dan interpretasi tema, serta *audit trail* yang mendokumentasikan seluruh proses analisis mulai dari transkrip, proses pengodean, hingga pembentukan tema sehingga proses penelitian dapat ditelusuri secara transparan (Lincoln & Guba, 1985). Pendekatan ini dipilih karena lebih sesuai untuk penelitian fenomenologis dibandingkan sekadar membandingkan data antarpartisipan yang memiliki karakteristik serupa.

Penelitian juga memperhatikan prinsip etika penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan, seluruh informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian dan menandatangani *informed consent*. Identitas informan disamarkan menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan, dan setiap informan diberikan hak untuk menghentikan partisipasi kapan pun tanpa konsekuensi apabila merasa tidak nyaman selama proses penelitian berlangsung.

3. Hasil dan Pembahasan

Relasi Pacaran dan Ketimpangan Relasi Kuasa

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menggambarkan bahwa hubungan pacaran yang mereka jalani tidak berlangsung dalam posisi yang setara. Kontrol pasangan tidak selalu muncul dalam bentuk larangan atau kekerasan yang bersifat langsung, tetapi lebih sering hadir melalui praktik-praktik sehari-hari yang dipersepsikan sebagai bentuk perhatian. Bentuk kontrol yang paling sering dialami meliputi tuntutan untuk selalu memberikan kabar, pengawasan aktivitas melalui media sosial, pembatasan relasi pertemanan, serta tekanan emosional ketika informan tidak memenuhi harapan pasangan.

Seorang informan menjelaskan bahwa pasangannya meminta dirinya untuk selalu melaporkan aktivitas sehari-hari.

"Kalau saya telat membalas chat atau lupa memberi kabar, dia langsung marah. Akhirnya saya merasa harus selalu memberi tahu semua kegiatan supaya tidak terjadi pertengkaran." (SA, 22 tahun)

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menganggap pembatasan hubungan sosial sebagai sesuatu yang pada awalnya wajar.

"Awalnya saya pikir dia hanya khawatir. Lama-lama saya tidak boleh sering bertemu teman laki-laki, bahkan teman perempuan tertentu juga dipermasalahkan. Saya baru sadar kalau itu sebenarnya membuat saya kehilangan ruang untuk diri sendiri." (CW, 21 tahun)

Selain kontrol terhadap aktivitas sosial, beberapa informan juga mengalami pengawasan melalui media digital. Mereka diminta memberikan akses terhadap akun media sosial, membagikan lokasi secara langsung (*live location*), atau menjelaskan setiap aktivitas komunikasi dengan orang lain. Sebagian besar informan mengaku mengikuti permintaan tersebut untuk menghindari konflik dan mempertahankan hubungan. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam hubungan pacaran tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan yang tampak, tetapi melalui praktik kontrol yang diterima sebagai bagian dari hubungan romantis. Informan secara bertahap menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan harapan pasangan, meskipun hal tersebut membatasi kebebasan pribadi.

Tabel 1. Tabel Informan

Kode No Informan	Usia	Status	LamaRelasi Pacaran	Karakteristik Hubungan
1 SA	22 Tahun	Mahasiswa	2 Tahun	Mengalami kontrol media sosial dan pengawasan aktivitas sehari-hari oleh pasangan
2 BS	21 Tahun	Mahasiswa	1,5 Tahun	Mengalami tekanan emosional dalam mempertahankan hubungan dan kesulitan menolak pasangan
3 CW	21 Tahun	Mahasiswa	3 Tahun	Mengalami pembatasan relasi sosial dan perilaku posesif pasangan
4 DU	23 Tahun	Mahasiswa	2 Tahun	Memaknai perilaku posesif sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang
5 EV	22 Tahun	Mahasiswa	1 Tahun	Mengalami ambiguitas consent dalam hubungan intim
6 FR	20 Tahun	Mahasiswa	1,5 Tahun	Mengalami tekanan relasional dan rasa bersalah ketika menolak pasangan
7 GI	20 Tahun	Mahasiswa	2 Tahun	Mengalami ketergantungan emosional dan kesulitan menetapkan batas personal
8 HE	23 Tahun	Mahasiswa	4 Tahun	Mengalami kontrol terhadap aktivitas personal dan tekanan mempertahankan hubungan

Temuan tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam hubungan pacaran bekerja melalui mekanisme yang bersifat subtil, sebagaimana dijelaskan oleh Foucault (1978). Kekuasaan tidak hanya hadir melalui paksaan langsung, tetapi juga melalui proses pengawasan (*surveillance*), normalisasi, dan pendisiplinan yang mendorong individu mengatur perilakunya sendiri. Dalam konteks penelitian ini, tuntutan untuk selalu memberi kabar, pengawasan media sosial, dan pembatasan relasi sosial diterima sebagai bentuk perhatian sehingga praktik dominasi tidak lagi dipersepsikan sebagai kekerasan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Neal et al. (2022) yang menunjukkan bahwa perilaku posesif sering dimaknai sebagai ekspresi kasih sayang dalam hubungan romantis. Di sisi lain, budaya digital memperluas ruang pengawasan melalui akses terhadap media sosial, lokasi, dan komunikasi personal sehingga kontrol pasangan menjadi semakin mudah dilakukan. Kondisi ini sejalan dengan data Komnas Perempuan (2023) yang menunjukkan bahwa kekerasan di ranah personal tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kontrol emosional, manipulasi psikologis, dan tekanan seksual. Dengan demikian, relasi pacaran tidak hanya menjadi hubungan interpersonal, tetapi juga ruang sosial tempat relasi kuasa diproduksi, dinegosiasikan, dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk Ambiguitas *Consent* pada Relasi Pacaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memaknai *consent* sebagai sesuatu yang tidak selalu diungkapkan secara verbal. Persetujuan dalam hubungan intim lebih sering diasumsikan muncul karena adanya kedekatan emosional, lamanya menjalin hubungan, atau status sebagai pasangan. Akibatnya, beberapa informan mengaku tetap menyetujui aktivitas yang sebenarnya tidak sepenuhnya mereka inginkan karena khawatir mengecewakan pasangan atau memicu konflik.

Seorang informan mengungkapkan bahwa ia sering merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan penolakan.

"Kadang sebenarnya saya tidak siap, tetapi saya takut kalau menolak dia akan berpikir saya sudah tidak sayang lagi. Akhirnya saya memilih mengiyakan supaya hubungan kami tidak bermasalah." (BS, 21 tahun).

Pengalaman serupa disampaikan oleh informan lain yang mengaitkan persetujuan dengan lamanya hubungan yang telah dijalani.

"Karena kami sudah pacaran cukup lama, saya merasa kalau menolak terus nanti dia kecewa. Jadi saya lebih sering mengikuti saja meskipun sebenarnya belum tentu nyaman." (FR, 20 tahun)

Beberapa informan juga menjelaskan bahwa rasa takut kehilangan pasangan membuat mereka sulit mempertahankan batas personal. persetujuan yang diberikan lebih didorong oleh keinginan mempertahankan hubungan dibandingkan oleh kesiapan pribadi. selain itu, kontrol terhadap media sosial dan pembatasan relasi sosial memperkuat ketergantungan emosional sehingga informan semakin sulit menolak keinginan pasangan. temuan tersebut kemudian dirangkum dalam gambar 1 dan tabel 2 SEBAGAI BERIKUT.

Tabel 2. Ilustrasi Dinamika *Consent* Ambigu

Ketergantungan Emosional		→	Takut Kehilangan Pasangan		→	Kesulitan Menolak		→	Consent Ambigu	
Kontrol Media Sosial	→	Pengawasan Aktivitas	→	Pembatasan Relasi Sosial	→	Dominasi Pasangan				
Kedekatan Emosional	→	Takut Konflik	→	Sulit Menolak	→	Persetujuan Situasional	→	Consent Ambigu		

Tabel 3. Kesimpulan Perbandingan

Aspek Pemicu	Mekanisme Internal	Output Perilaku	Status Akhir
Ketergantungan	Insecuritas	Ketidakmampuan Berkata "Tidak"	Consent Kabur
Kontrol Digital	Isolasi Sosial	Kehilangan Privasi & Otonomi	Dominasi Total
Kedekatan	Penghindaran Konflik	Persetujuan Karena Kondisi	Consent Terpaksa

Temuan tersebut kemudian dirangkum dalam Gambar 1 dan Tabel 2. Kedua ilustrasi menunjukkan bahwa ketergantungan emosional, pengawasan digital, dan rasa takut terhadap konflik membentuk proses persetujuan yang bersifat situasional. Dalam kondisi tersebut, *consent* tidak selalu lahir dari pilihan yang sepenuhnya bebas, tetapi berkembang melalui dinamika hubungan yang kompleks dan bertahap.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *consent* dalam hubungan pacaran merupakan proses yang dinegosiasikan dalam konteks relasi kuasa, bukan sekadar keputusan individual. Perspektif Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui mekanisme normalisasi dan pengaturan diri (*governmentality*), sehingga individu secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan harapan yang berkembang dalam relasi sosial (Foucault, 1978). Dalam penelitian ini, rasa takut kehilangan pasangan, keinginan mempertahankan hubungan, dan pengawasan digital mendorong informan untuk memberikan persetujuan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan mereka.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Jozkowski et al. (2022) yang menunjukkan bahwa *consent* dalam hubungan romantis sering diasumsikan berdasarkan kedekatan emosional, bukan melalui komunikasi yang eksplisit. Selain itu, Neal et al. (2022) dan Beres (2023) menjelaskan bahwa ketergantungan emosional serta norma romantisasi hubungan dapat membuat perempuan lebih sulit menolak aktivitas seksual karena khawatir dianggap tidak mencintai pasangan atau tidak berkomitmen terhadap hubungan. Dengan demikian, *consent* dalam hubungan pacaran perlu dipahami sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, norma gender, tekanan emosional, dan budaya digital, bukan semata-mata sebagai keputusan personal.

***Consent* sebagai Bentuk Negosiasi dalam Relasi Intim**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *consent* dalam hubungan pacaran tidak selalu dipahami sebagai persetujuan yang dikomunikasikan secara eksplisit. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan dalam hubungan sering dipengaruhi oleh dominasi pasangan laki-laki, baik dalam komunikasi, aktivitas sosial, maupun aktivitas seksual. Dominasi tersebut tampak melalui kontrol terhadap media sosial, pembatasan relasi sosial, hingga tekanan emosional yang membuat perempuan kesulitan mempertahankan batas personal.

SA menjelaskan bahwa pasangannya meminta akses terhadap media sosial dan lokasi

secara *real time* sebagai bentuk perhatian.

"Awalnya aku mikir itu bentuk perhatian, jadi dia minta password Instagram sama lokasi. Tapi lama-lama aku ngerasa semua aktivitas dia harus tahu." (SA, 22 tahun).

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh CW yang mengalami pembatasan dalam berinteraksi dengan teman selama menjalani hubungan pacaran.

"Dia nggak suka aku terlalu dekat sama teman cowok. Kadang kalau aku nongkrong sama teman kampus dia marah." (CW, 21 tahun).

Selain kontrol terhadap aktivitas sosial, sebagian besar informan mengaku kesulitan menolak keinginan pasangan karena khawatir hubungan akan memburuk atau berakhir. Ketakutan kehilangan pasangan membuat mereka lebih memilih mengikuti keinginan pasangan meskipun sebenarnya merasa tidak nyaman.

"Kadang aku sebenarnya nggak nyaman, tapi takut dia marah atau ninggalin aku kalau aku nolak." (FR, 20 tahun).

Beberapa informan juga menganggap perilaku posesif sebagai bentuk kasih sayang sehingga kontrol pasangan dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar dalam hubungan.

"Kalau dia cemburu aku malah mikir berarti dia sayang." (DU, 23 tahun).

Temuan lain menunjukkan bahwa komunikasi mengenai *consent* hampir tidak pernah dilakukan secara terbuka. Informan mengaku lebih sering menganggap persetujuan sebagai sesuatu yang terjadi secara otomatis karena hubungan yang telah terjalin cukup lama.

"Nggak pernah ngomong langsung soal setuju atau nggak. Biasanya ya ngalir aja." (EV, 22 tahun).

Akibatnya, beberapa informan mengalami kesulitan membedakan antara persetujuan yang diberikan secara sukarela dengan persetujuan yang muncul karena tekanan emosional. Rasa takut mengecewakan pasangan maupun memicu konflik membuat mereka lebih memilih mengalah.

"Aku takut kalau nolak nanti dia kecewa atau marah." (GI, 20 tahun).

Selain itu, sebagian informan memandang bahwa memenuhi keinginan pasangan merupakan bagian dari tanggung jawab dalam hubungan romantis.

"Aku pikir mungkin emang harus saling memenuhi kebutuhan pasangan." (DU, 23 tahun).

Ketergantungan emosional juga menjadi pengalaman yang banyak diungkapkan oleh informan. Mereka tetap mempertahankan hubungan meskipun merasa tidak nyaman karena telah memiliki keterikatan emosional yang kuat.

"Aku udah terlalu sayang sama dia, jadi walaupun kadang capek ya tetap bertahan." (HE, 23 tahun)

Beberapa informan menjelaskan bahwa ketika mereka menolak keinginan pasangan, pasangan menunjukkan perubahan sikap seperti diam, menjauh, atau bersikap acuh sehingga memunculkan rasa bersalah.

"Kalau aku nolak dia jadi diem, terus cuek beberapa hari." (CW, 21 tahun)

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *consent* dalam hubungan pacaran sering kali dinegosiasikan dalam situasi yang dipengaruhi oleh ketergantungan emosional, rasa takut kehilangan pasangan, dan keinginan mempertahankan hubungan.



Gambar 1. Contoh Cuitan di Platform X

Gambar 2 disajikan sebagai ilustrasi yang memperlihatkan adanya pengalaman serupa di ruang publik digital, yaitu ketika perempuan mengalami tekanan seksual dari pasangan meskipun telah menyatakan penolakan. Meskipun bukan merupakan data utama penelitian, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman mengenai ambiguitas *consent* juga muncul dalam diskursus media sosial dan memiliki kesesuaian dengan pengalaman yang disampaikan oleh para informan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *consent* dalam hubungan pacaran tidak semata-mata merupakan keputusan individual, tetapi merupakan hasil negosiasi yang berlangsung dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Perspektif Michel Foucault (1978; 1991) menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui mekanisme normalisasi, pengawasan (*surveillance*), dan *governmentality*, sehingga individu secara bertahap menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma yang berkembang dalam hubungan. Dalam penelitian ini, kontrol terhadap media sosial, pembatasan relasi sosial, serta perubahan sikap pasangan setelah penolakan menjadi bentuk-bentuk kuasa yang mendorong perempuan mengatur dirinya sendiri demi menjaga keberlangsungan hubungan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa *consent* lebih sering dipahami sebagai kompromi untuk mempertahankan hubungan daripada sebagai persetujuan yang dikomunikasikan secara bebas. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Jozkowski et al. (2022) yang menyatakan bahwa *consent* dalam hubungan romantis sering diasumsikan berdasarkan kedekatan emosional, bukan melalui komunikasi yang eksplisit. Selain itu, Neal et al. (2022) dan Beres (2023) menjelaskan bahwa ketergantungan emosional, norma romantisasi hubungan, dan ketakutan kehilangan pasangan dapat membatasi kemampuan perempuan untuk menyampaikan penolakan.

Keberadaan media sosial juga memperkuat mekanisme relasi kuasa melalui praktik pengawasan terhadap aktivitas pasangan. Dalam perspektif Foucauldian, ruang digital tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga menjadi arena produksi diskursus mengenai hubungan romantis yang membentuk cara individu memahami perhatian, kesetiaan, dan pengorbanan dalam hubungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *consent* tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan personal, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, norma gender, ketergantungan emosional, dan budaya digital.

Media Sosial dan Normalisasi Relasi Tidak Sehat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa media sosial menjadi bagian penting dalam dinamika hubungan pacaran yang dialami para informan. Sebagian besar informan mengaku bahwa komunikasi dengan pasangan berlangsung secara intens melalui berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana pasangan melakukan pengawasan terhadap aktivitas sehari-hari.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka diminta membagikan lokasi secara *real time*, memberikan akses terhadap akun media sosial, atau menjelaskan interaksi dengan pengguna lain. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai bentuk perhatian, praktik tersebut secara bertahap dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap ruang pribadi.

"Awalnya aku pikir itu wajar karena dia sayang sama aku. Lama-lama aku merasa semua aktivitas harus diketahui, bahkan kalau aku lama balas pesan dia langsung curiga." (SA, 22 tahun).

Selain pengawasan digital, informan juga mengungkapkan bahwa berbagai konten di media sosial memengaruhi cara mereka memandang hubungan romantis. Beberapa informan menganggap perilaku posesif, rasa cemburu, atau tuntutan untuk selalu memberikan kabar sebagai sesuatu yang lumrah karena sering ditampilkan sebagai bentuk kasih sayang dalam berbagai unggahan di media sosial.

"Di media sosial sering lihat kalau pasangan yang perhatian itu memang selalu minta dikabarin. Jadi awalnya aku merasa itu hal yang biasa." (DU, 23 tahun).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman informan tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi dengan pasangan, tetapi juga oleh paparan budaya digital yang membentuk cara mereka memahami perhatian, kesetiaan, dan komitmen dalam hubungan pacaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang yang membentuk cara individu memaknai hubungan romantis dan relasi intim. Perspektif Michel Foucault memandang media sebagai arena produksi diskursus yang menghasilkan sekaligus menormalisasi pengetahuan mengenai perilaku yang dianggap benar atau ideal. Diskursus yang terus direproduksi melalui media digital membuat individu menginternalisasi praktik tertentu sebagai sesuatu yang wajar, termasuk perilaku posesif, pengawasan terhadap pasangan, dan tuntutan untuk selalu tersedia dalam hubungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Beres (2023) yang menjelaskan bahwa media digital berperan dalam membentuk konstruksi sosial mengenai hubungan romantis melalui representasi yang terus dikonsumsi oleh generasi muda. Neal et al. (2022) juga menunjukkan bahwa perilaku kontrol sering dimaknai sebagai bentuk afeksi ketika dibingkai dalam narasi romantis di media sosial, sehingga batas antara perhatian dan dominasi menjadi semakin kabur. Sementara itu, Jozkowski et al. (2022) menegaskan bahwa media digital turut memengaruhi cara individu memahami *consent* dan komunikasi seksual karena interaksi romantis semakin banyak berlangsung melalui ruang digital.

Dalam perspektif Foucauldian, kondisi tersebut mencerminkan mekanisme normalisasi dan *governmentality*, yaitu ketika individu secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berkembang dalam lingkungan sosial. Perempuan dalam penelitian ini cenderung menerima pengawasan, pembatasan relasi sosial, maupun tuntutan untuk selalu memenuhi harapan pasangan karena praktik-praktik tersebut telah dinormalisasi melalui budaya digital. Dengan demikian, media sosial tidak hanya merepresentasikan realitas hubungan pacaran, tetapi juga berperan dalam memproduksi, memperkuat, dan menormalisasi relasi kuasa dalam hubungan romantis kontemporer.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *consent* dalam hubungan pacaran mahasiswa tidak selalu terbentuk sebagai keputusan yang sepenuhnya bebas. Persetujuan dipengaruhi oleh relasi kuasa yang bekerja melalui ketergantungan emosional, kontrol media sosial, pembatasan relasi sosial, tekanan emosional, norma gender, dan romantisasi hubungan. Melalui perspektif Michel Foucault, temuan ini menegaskan bahwa *consent* merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses normalisasi, pengawasan, dan pengaturan diri (*governmentality*), sehingga praktik dominasi sering kali tidak disadari sebagai bentuk ketimpangan dalam hubungan intim. Penelitian ini memperluas kajian mengenai *consent* dengan menghadirkan perspektif sosiologis yang menempatkan relasi kuasa sebagai faktor penting dalam pembentukan persetujuan pada hubungan pacaran. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi perguruan tinggi, konselor, dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan untuk mengembangkan program edukasi mengenai *consent*, literasi relasi yang sehat, kesetaraan gender, serta penggunaan media digital secara kritis guna mencegah normalisasi perilaku posesif dan bentuk-bentuk kontrol dalam hubungan romantis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena melibatkan delapan informan mahasiswa perempuan di satu kota sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh populasi. Selain itu, penelitian hanya menggali perspektif perempuan tanpa melibatkan pengalaman pasangan laki-laki maupun kelompok dengan latar belakang sosial yang berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan partisipan yang lebih beragam, menggunakan pendekatan komparatif atau longitudinal, serta mengeksplorasi peran media digital dan dinamika *consent* pada berbagai konteks hubungan intim untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arianto, B. (2022). Media sosial dan konstruksi relasi romantis Generasi Z. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 101–118.
- Beres, M. A. (2023). Sexual consent, gender norms, and intimate relationships among young adults. *Journal of Gender Studies*, 32(4), 455–469. <https://doi.org/10.1080/09589236.2023.2184512>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>

- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Chandra, R., & Bennett, L. (2024). Gendered power relations and sexual consent in intimate relationships. *Gender Issues*, 41(1), 22–39. <https://doi.org/10.1007/s12147-023-09321-5>
- Connell, R. W. (2022). *Gender: In world perspective* (4th ed.). Polity Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Fitriani, D. (2021). Budaya digital dan romantisasi hubungan *toxic* di kalangan mahasiswa. *Jurnal Interaksi Sosial*, 10(1), 55–70.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume I. An introduction*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.
- Gill, R. (2021). Postfeminism and the cultural life of choice: Feminist reflections on agency, autonomy, and subjectivity. *Feminist Media Studies*, 21(8), 1235–1248. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1736118>
- Handayani, S. (2020). Kekerasan simbolik dalam hubungan pacaran mahasiswa. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3), 233–248.
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Jackson, S., & Scott, S. (2022). *Gender: A sociological reader* (Revised ed.). Routledge.
- Jeffrey, L. A. (2022). Consent, power, and sexual negotiation in contemporary intimate relationships. *Sexualities*, 25(6), 845–861. <https://doi.org/10.1177/13634607211024310>
- Jozkowski, K. N., & Willis, M. (2021). Negotiating sexual consent in intimate relationships. *Current Opinion in Psychology*, 36, 41–46. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.03.012>
- Jozkowski, K. N., Willis, M., & Murray, K. N. (2022). Sexual consent in committed relationships. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 48(5), 601–614. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.2010819>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. Komnas Perempuan.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publications.
- Lestari, A. (2024). Relasi kuasa dalam hubungan pacaran mahasiswa perkotaan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 44–61.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.

- Neal, T. M. S., Brodsky, S. L., **et al.** (2022). Emotional dependence and sexual consent in young adult romantic relationships. *Psychology of Women Quarterly*, 46(3), 345–360. <https://doi.org/10.1177/03616843221087345>
- Ningsih, P. (2021). Negosiasi *consent* perempuan dalam hubungan intim. *Jurnal Kajian Gender*, 13(2), 145–162.
- Palermo, C. (2022). Relationship contexts and the communication of sexual consent. *Archives of Sexual Behavior*, 51(4), 2101–2115. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02167-4>
- Rahmawati, I. (2023). Pengawasan digital dan kontrol pasangan dalam relasi romantis. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, 7(2), 88–105.
- Sari, M. (2022). Ketergantungan emosional pada relasi pacaran mahasiswa. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(1), 77–91.
- Setiawan, R. (2021). Budaya populer dan normalisasi *toxic relationship*. *Jurnal Cultural Studies Indonesia*, 5(2), 120–136.
- Utami, R. (2024). Gender, consent, and emotional pressure among young women. *Journal of Contemporary Gender Studies*, 6(1), 33–49.
- Wartoyo. (2023). Relasi kuasa dan kekerasan seksual di institusi pendidikan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 155–171. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i2.2876>
- Wibowo, A. (2020). Relasi kuasa Michel Foucault dalam kehidupan intim mahasiswa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 8(3), 201–216.
- Yusuf, N. (2023). Romantisasi perilaku posesif di media sosial TikTok. *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(2), 99–117.
- Zahara, F. (2022). Konstruksi seksualitas mahasiswa dalam budaya digital. *Jurnal Humaniora dan Gender*, 14(1), 67–82.